

# Online Monitoring Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan

Kezia Elsa Eunike Ondang, Yaulie D. Y. Rindengan, Alwin M. Sambul  
Teknik Informatika Universitas Sam Ratulangi  
120216099@student.unsrat.ac.id, rindengan@unsrat.ac.id, asambul@unsrat.ac.id

**Abstrak** –Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 pada bab IV pasal 12 menjelaskan pemerintah kabupaten/kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya. Program pemerintah pusat berkaitan dengan penyaluran dana setiap tahun mengalami peningkatan. Pemerintah pusat mengupayakan agar pengelolaan dana desa harus tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian tentang monitoring dana desa penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan terkait dengan pengelolaan dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan dalam monitoring terkait dengan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi seperti laporan tahunan, semesteran dan bulanan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa proses monitoring sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses monitoring mulai tujuan monitoring, perencanaan monitoring, serta adanya pelaporan pencapaian monitoring.

**Kata kunci : Monitoring Desa, Dana Desa**

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 pada bab IV pasal 12 menjelaskan pemerintah kabupaten/kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.

Program pemerintah pusat berkaitan dengan penyaluran dana setiap tahun mengalami peningkatan. Pemerintah pusat mengupayakan agar pengelolaan dana desa harus tepat sasaran. Pengawasan dilakukan secara bersama baik dari masyarakat maupun pemerintah yang ada di kecamatan maupun kabupaten. Khususnya Kabupaten Minahasa Selatan monitoring penggunaan dan

pengolaan dana desa masih terbilang manual, karena mulai dari pencatatan dana desa masih terbilang tidak teratur dan sangat memakan biaya kepada SKPD untuk mendatangi langsung setiap bulan di semua desa.

Dengan perkembangan zaman sekarang ini, teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk terciptanya sistem yang lebih baik. Teknologi informasi dapat membantu SKPD di tingkat Kabupaten Minahasa Selatan memberikan informasi penggunaan dana desa melalui monitoring. Dengan melakukan monitoring secara online agar dari SKPD dengan mudah menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang implementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Sistem ini sangat dibutuhkan oleh SKPD yang berwenang, karena merupakan sarana yang dapat mendapatkan informasi tentang dana desa dengan lebih efisien, cepat dan akurat.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Online

Online merupakan istilah yang sering kita gunakan ketika terhubung dengan internet atau dunia maya. Terhubungnya internet itu walaupun hanya terhubung dengan media sosial kita hingga email dan segala macam jenis akun yang kita miliki untuk dapat menggunakan internet. Saat ini banyak sekali cara yang dapat di gunakan untuk dapat online internet salah satunya dengan menggunakan smartphone yang memiliki kota atau layana internet kita bias langung masuk ke jaringan internet.

Online dapat di lakukan kapanpun dan dimanapun karena online internet tidak memiliki batasan waktu dan usia hingga semua orang dapat mengakses internet dengan nyaman. Online di katakana bagi pengguna internet yang berhasil masuk ke dalamn jaringan internet tanpa mengalami suatu kendala.

### B. Monitoring

Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang pelaporan dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan. Umumnya monitoring digunakan dalam *checking* antara kinerja dan target yang telah ditentukan.

Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana (*on the track*). Monitoring dapat memberikan informasi

keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Pada pelaksanaannya, monitoring dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Level kajian sistem monitoring mengacu pada kegiatan per kegiatan dalam suatu bagian, misalnya kegiatan pemesanan barang pada supplier oleh bagian *purchasing*. Indikator yang menjadi acuan monitoring adalah output per proses / per kegiatan.

Umumnya, pelaku monitoring merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses (*self monitoring*) maupun atasan / *supervisor* pekerja. Berbagai macam alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan sistem monitoring, baik observasi / *interview* secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi visual.

### C. Konsep Dasar Dana Desa

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat diketahui dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan prioritas tahun 2015 belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pembangunan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.

### D. Kabupaten Minahasa Selatan

Sejalan dengan bergulirnya nuansa reformasi dan implementasi kebijakan otonomi daerah, muncul aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang menginginkan pemekaran wilayahnya, baik propinsi maupun kabupaten/kota. Demikian pula masyarakat di Minahasa Selatan yang menginginkan pemekaran wilayahnya menjadi daerah otonom yang baru.

Maksudnya pemekaran daerah ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rentang kendali penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi daerah secara lebih optimal, terwujudnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya pengembangan kehidupan demokrasi dan peran masyarakat serta rasa keadilan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, untuk lebih mendayagunakan pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah yang pelaksanaannya memperhatikan potensi daerah, keanekaragaman dan kepentingan masyarakat di daerah, guna kesejahteraan masyarakat.

Aspirasi masyarakat Minahasa Selatan, secara positif disikapi dan diakomodasikan oleh Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Minahasa. Setelah melalui kajian (seminar, diskusi, panel, dialog) dan melalui proses sesuai aturan perundangan yang berlaku, aspirasi ini disetujui oleh DPRD Kabupaten Minahasa melalui surat Nomor 170/DPRD/122/2000 tanggal 23 Maret 2000 tentang Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Bupati Minahasa menyampaikan surat Kepada Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Nomor 458/B.MIN/IX-2001 perihal Hasil Kajian Awal Pemerintah Daerah dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan.

Setelah melakukan pengkajian, DPRD Kabupaten Minahasa mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Persetujuan Prinsip DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya, Bupati Minahasa menyampaikan usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui surat Nomor 530B.Min/IX-2001 tanggal 26 November 2001. Kemudian, atas pertimbangan dan persetujuan DPRD Propinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, Gubernur Sulawesi Utara menindaklanjuti usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Dalam proses selanjutnya di tingkat pusat, usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan bersama Kota Tomohon menjadi usul inisiatif DPR-RI. Guna melengkapi data dan masukan secara empirik, Tim Komisi DPR-RI melakukan peninjauan lapangan pada tahap awal yang selanjutnya diikuti oleh Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Pusat. Setelah

melalui proses persetujuan DPR-RI, pada tanggal 27 Januari 2003, Minahasa Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom yang baru di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 yang mencakup 13 Kecamatan. Usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon diproses bersama-sama dengan 25 calon kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

E. Metode Prototype

Dalam melakukan perancangan sistem yang akan dikembangkan dapat menggunakan metode prototype. Metode ini cocok digunakan untuk mengembangkan sebuah perangkat yang akan dikembangkan kembali. Metode ini dimulai dengan pengumpulan pengguna, dalam hal ini pengguna dari perangkat yang dikembangkan adalah peserta didik. Kemudian membuat sebuah rancangan kilat yang selanjutnya akan dievaluasi kembali sebelum diproduksi secara benar.

Prototype bukanlah sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus dievaluasi dan dimodifikasi kembali. Segala perubahan dapat terjadi pada saat prototype dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan pada saat yang sama memungkinkan pengembang untuk lebih memahami kebutuhan pengguna secara lebih baik.

Tahapan dalam metode prototype adalah Komunikasi dan pengumpulan data awal, yaitu analisis terhadap kebutuhan pengguna. Quick design, yaitu pembuatan desain secara umum untuk selanjutnya dikembangkan kembali. Pembentukan prototype, yaitu pembuatan perangkat prototype termasuk pengujian dan penyempurnaan. Evaluasi terhadap prototype yaitu mengevaluasi prototype dan memperluas analisis terhadap kebutuhan pengguna. Perbaiki prototype, yaitu pembuatan tipe yang sebenarnya berdasarkan hasil dari evaluasi prototype. Produksi akhir, yaitu memproduksi perangkat secara benar sehingga dapat digunakan oleh pengguna.

III. Metodologi Penelitian

A. Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan untuk melakukan prototype sistem online monitoring dana desa di Kabupaten Minahasa Selatan berbasis website adalah metode pengembangan sistem dengan model Prototype.

Pada tahap ini penulis dimulai dengan pengumpulan kebutuhan. Pada tahap ini penulis melakukan analisis kebutuhan dan mengidentifikasi segala kebutuhan.

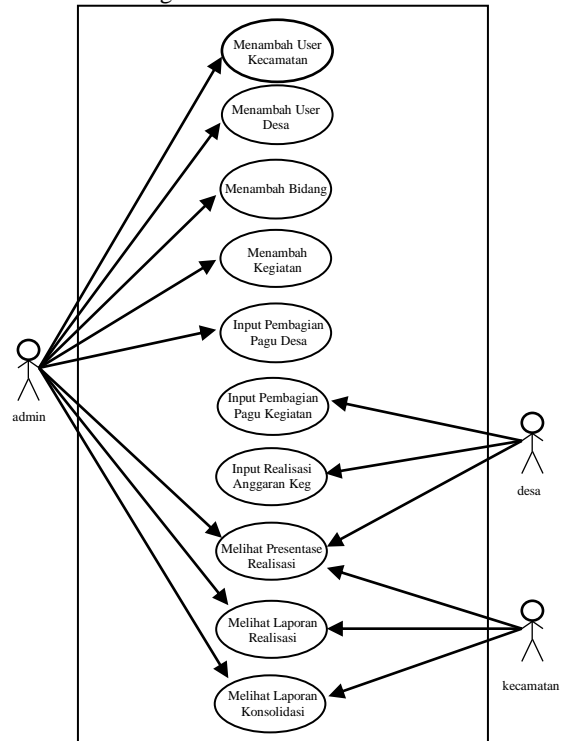
Analisa Sistem yang Berjalan yaitu Sistem yang berjalan saat ini monitoring dana desa di Kabupaten Minahasa Selatan masih manual mulai dari pencatatan dana desa dan kunjungan di semua desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Identifikasi Masalah yaitu Berdasarkan hasil analisis pada sistem berlangsung, terdapat masalah yang dihadapi yaitu pencatatan dana desa tidak teratur dan sangat memakan biaya kepada SKPD untuk mendatangi langsung setiap bulan di semua desa.

Usulan Penyelesaian Masalah yaitu Dengan melihat permasalahan yang ada maka di butuhkan sistem yang lebih baik, yaitu SKPD dengan mudah memonitoring dana desa secara online agar dapat menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Pada tahapan desain ini penulis merancang sistem yang akan dibangun. Adapun rancangan sistem yang penulis buat meliputi rancangan penentuan aktor, perancangan use case, use case description, activity diagram, class diagram, desain database dan desain interface.

1. Perancangan Use Case



Gambar 1 Perancangan Use Case

2. Perancangan Use Case Description

Tabel 1 Use Case Description Login

Identifikasi	
<b>Nama</b>	Login
<b>Tujuan</b>	Mengakses halaman utama admin SKPD
<b>Aktor</b>	Admin SKPD
<b>Kondisi Awal</b>	Sistem menampilkan halaman login
<b>Aksi Aktor</b>	<b>Reaksi Sistem</b>
mengisi data username dan password	menampilkan halaman utama admin SKPD
<b>Kondisi Akhir</b>	menampilkan halaman utama admin SKPD

Tabel 2 Use Case Description Input Admin Kecamatan

Identifikasi	
<b>Nama</b>	Input admin kecamatan
<b>Tujuan</b>	Mengisi data admin kecamatan berupa kecamatan, username dan password
<b>Aktor</b>	Admin SKPD
<b>Kondisi Awal</b>	Sistem menampilkan form input data admin kecamatan

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
mengisi data <i>admin</i> kecamatan	Menyimpan data <i>admin</i> kecamatan
<b>Kondisi Akhir</b>	
Menampilkan halaman data kecamatan dan <i>username</i> kecamatan	

Tabel 3 Use Case Description Input Admin Desa

Identifikasi	
<b>Nama</b>	Input <i>admin</i> desa
<b>Tujuan</b>	Mengisi data <i>admin</i> desa, <i>username</i> dan <i>password</i>
<b>Aktor</b>	Admin SKPD
<b>Kondisi Awal</b>	Sistem menampilkan <i>form input</i> data <i>admin</i> desa
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Mengisi data <i>admin</i> kecamatan	Menyimpan data <i>admin</i> desa
<b>Kondisi Akhir</b>	
Menampilkan halaman data desa dan <i>username</i> desa	

Tabel 4 Use Case Description Pembagian Pagu Desa

Identifikasi	
<b>Nama</b>	Pembagian pagu desa
<b>Tujuan</b>	Mengisi dan membagi pagu desa tahap satu dan tahap dua
<b>Aktor</b>	Admin SKPD
<b>Kondisi Awal</b>	Menampilkan halaman daftar pagu dan <i>button</i> untuk membuka halaman bagi pagu
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Mengisi dan membagi pagu desa ( <i>hapus, edit, tambah</i> )	Menyimpan pagu desa
<b>Kondisi Akhir</b>	
Menampilkan nama desa, jumlah pagu, jumlah pagu tahap satu, jumlah pagu tahap dua dan sisa jumlah pagu	

Tabel 5 Use Case Description Monitoring Alokasi Dana Desa

Identifikasi	
<b>Nama</b>	Monitoring Alokasi Dana Desa
<b>Tujuan</b>	Melihat jumlah pagu
<b>Aktor</b>	Admin SKPD
<b>Kondisi Awal</b>	Memilih kecamatan
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Melihat dan <i>copy</i> jumlah pagu	Memproses jumlah pagu kecamatan yang dipilih
<b>Kondisi Akhir</b>	
Menampilkan jumlah pagu	

Tabel 6 Use Case Description Monitoring Presentase Penyerapan

Identifikasi	
<b>Nama</b>	Monitoring Presentase Penyerapan
<b>Tujuan</b>	Melihat presentase penyerapan
<b>Aktor</b>	Admin SKPD
<b>Kondisi Awal</b>	Memilih kecamatan
Aksi Aktor	Reaksi Sistem

Melihat dan <i>copy</i> jumlah pagu	Memproses jumlah pagu kecamatan yang dipilih
<b>Kondisi Akhir</b>	
Menampilkan rekapitulasi presentase penyerapan, presentase penyerapan tahap pertama dan tahap kedua	

Tabel 7 Use Case Description Laporan Pembagian Pagu Perkecamatan

Identifikasi	
<b>Nama</b>	Laporan pembagian pagu desa per kecamatan
<b>Tujuan</b>	Menampilkan laporan per kecamatan
<b>Aktor</b>	Admin SKPD dan <i>admin</i> Kecamatan
<b>Kondisi Awal</b>	Sistem menampilkan daftar kecamatan
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Memilih kecamatan	Menampilkan daftar kecamatan
<b>Kondisi Akhir</b>	
Menampilkan laporan pagu desa yang ada di kecamatan yang dipilih, jumlah pagu, jumlah pagu tahap satu dan jumlah pagu tahap dua	

Tabel 8 Use Case Description Laporan Realisasi Anggaran

Identifikasi	
<b>Nama</b>	Laporan realisasi anggaran
<b>Tujuan</b>	Menampilkan laporan keuangan kegiatan desa
<b>Aktor</b>	Admin SKPD dan <i>admin</i> Kecamatan
<b>Kondisi Awal</b>	Sistem menampilkan daftar desa dan kalender
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Memonitoring dana desa dari sistem	Menampilkan laporan realisasi anggaran penggunaan dana desa
<b>Kondisi Akhir</b>	
Menampilkan kecamatan, desa, tanggal, jumlah penerimaan dana desa, jumlah pengeluaran dana desa, nama bidang dan kegiatan desa.	

Tabel 9 Use Case Description Konsolidasi

Identifikasi	
<b>Nama</b>	Konsolidasi
<b>Tujuan</b>	Menampilkan laporan konsolidasi penggunaan dana desa
<b>Aktor</b>	Admin SKPD dan <i>admin</i> Kecamatan
<b>Kondisi Awal</b>	Sistem menampilkan daftar kecamatan
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Memilih kecamatan	Menampilkan daftar kecamatan
<b>Kondisi Akhir</b>	
Menampilkan kecamatan, desa, jumlah pagu, jumlah pagu disetiap bidang, total pagu tiap bidang dan sisa pagu.	

Tabel 10 Use Case Description Bagi Pagu Desa

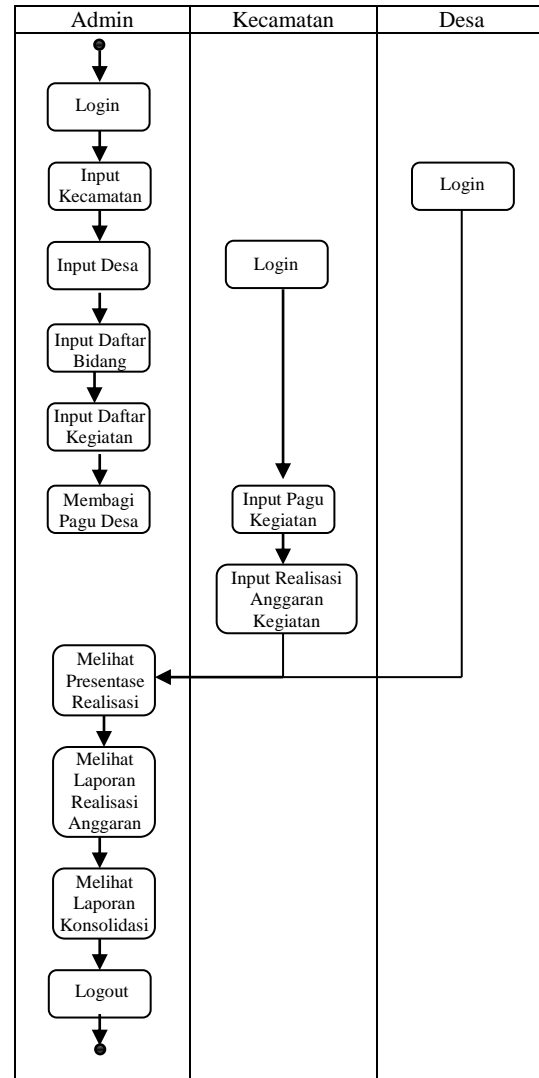
Identifikasi	
<b>Nama</b>	Bagi Pagu Desa
<b>Tujuan</b>	Menambah dan mengubah pagu desa
<b>Aktor</b>	Operator Desa
<b>Kondisi Awal</b>	Sistem menampilkan <i>form</i> menambah dan mengubah pagu desa
Aksi Aktor	Reaksi Sistem

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah pagu desa (memilih nama bidang, nama kegiatan, mengisi jumlah pagu, nomor dokumen, tanggal dokumen dan keterangan.</li> <li>2. Mengubah pagu desa (hapus atau ganti pagu desa)</li> </ol>	Menyimpan daftar pembagian pagu desa
<b>Kondisi Akhir</b> Menampilkan daftar pembagian pagu desa.	

Tabel 11 Use Case Description Realisasi Anggaran Desa

Identifikasi	
<b>Nama</b>	Realisasi anggaran desa
<b>Tujuan</b>	Menambah dan mengubah anggaran desa
<b>Aktor</b>	Operator Desa
<b>Kondisi Awal</b>	Sistem menampilkan <i>form</i> menambah dan mengubah anggaran desa
<b>Aksi Aktor</b>	<b>Reaksi Sistem</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah pagu desa (memilih nama kegiatan, mengisi jumlah realisasi, nomor dokumen, tanggal dokumen dan keterangan.</li> <li>2. Mengubah anggaran desa (hapus atau ganti anggaran desa)</li> </ol>	Menyimpan daftar realisasi anggaran desa
<b>Kondisi Akhir</b> Menampilkan daftar realisasi anggaran desa.	

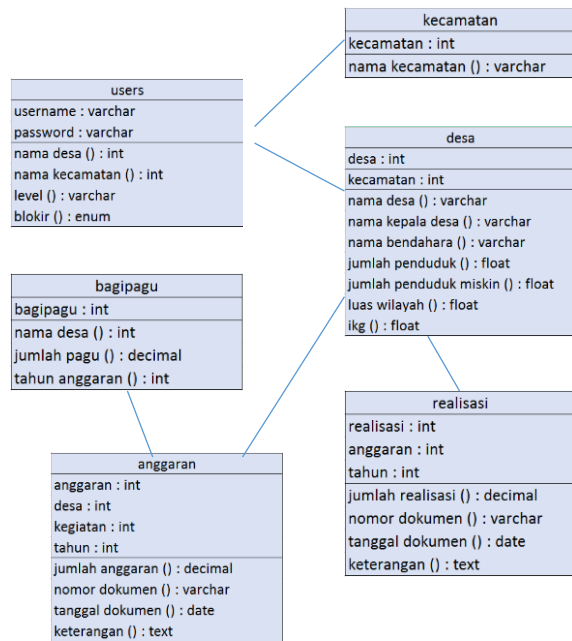
### 3. Activity Diagram



Gambar 2 Activity Diagram

### 4. Class Diagram

Class diagram ini digunakan untuk menggambarkan kumpulan dari *class* dan hubungannya. Diagram ini merupakan diagram yang paling umum ditemukan dalam pemodelan sistem berorientasi *object*. Class menggambarkan keadaan suatu sistem sekaligus layanan untuk memanipulasi keadaan metode atau fungsi sehingga *class* memiliki tiga area pokok, yaitu : nama, atribut, dan metode. Selain itu setiap *class* yang ada dapat menjadi sebuah *form* saat pembuatan program. Class diagram sistem yang diusulkan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3 Class Diagram

5. Desain Basis Data

Pada database ini semua jenis data yang terlibat dalam proses yang terjadi, didefinisikan dan dikumpulkan dalam bentuk penyajian sebagai berikut :

Tabel 12 Daftar Tabel

No	Nama Tabel	Keterangan
1	Tabel t_anggaran	Berisi data anggaran kegiatan per desa
2	Tabel t_bagipagu	Berisi tentang pembagian pagu desa
3	Tabel t_bidang	Berisi nama-nama bidang
4	Tabel t_desa	Berisi nama-nama desa di Kabupaten minahasa selatan
5	Tabel t_kecamatan	Berisi nama-nama kecamatan di Kabupaten minahasa selatan
6	Tabel t_kegiatan	Berisi nama-nama kegiatan
7	Tabel t_pagu	Berisi data anggaran yang sudah bisa direalisasi
8	Tabel t_program	Berisi nama-nama program
9	Tabel t_realisasi	Berisi data realisasi anggaran kegiatan tiap desa
10	Tabel t_tahap	Berisi nama-nama tahap
11	Tabel t_tahun	Berisi data untuk tahun anggaran
12	Tabel users	Berisi tentang data pengelola sistem
13	Tabel warna	Berisi nama-nama warna untuk tema aplikasi

Tabel 13 Tabel Anggaran

No	Nama Atribut	Tipe Data	Ket
1	id_anggaran	int(5)	PRI KEY
2	id_desa	int(5)	
3	id_kegiatan	int(5)	
4	id_tahun	int(5)	
5	Anggaran	decimal(30,0)	
6	Nomor	varchar(20)	
7	tanggal	date	
8	keterangan	text	FOR KEY

Tabel 14 Tabel Bagi Pagu

No	Nama Atribut	Tipe Data	Ket
1	id_bagipagu	int(5)	PRI KEY
2	id_desa	int(5)	
3	pagu	decimal(30,0)	
4	id_tahun	int(5)	FOR KEY

Tabel 15 Tabel Bidang

No	Nama Atribut	Tipe Data	Ket
1	id_bidang	int(5)	PRI KEY
2	id_program	int(5)	
3	bidang	text	
4	aktif	enum('Y','N')	FOR KEY

Tabel 16 Tabel Desa

No	Nama Atribut	Tipe Data	Ket
1	id_desa	int(5)	PRI KEY
2	id_kecamatan	int(5)	
3	desa	varchar(100)	
4	kepala	varchar(50)	
5	bendahara	varchar(50)	
6	jp	float	
7	jpm	float	
8	lw	float(10,6)	
9	ikg	float(10,6)	FOR KEY

Tabel 17 Tabel Kecamatan

No	Nama Atribut	Tipe Data	Ket
1	id_kecamatan	int(11)	PRI KEY
2	kecamatan	varchar(100)	FOR KEY

Tabel 18 Tabel Kegiatan

No	Nama Atribut	Tipe Data	Ket
1	id_kegiatan	int(5)	PRI KEY
2	id_bidang	int(5)	
3	kegiatan	text	FOR KEY

Tabel 19 Tabel Pagu

No	Nama Atribut	Tipe Data	Ket
1	id_pagu	int(5)	PRI KEY
2	id_kegiatan	int(5)	
3	id_desa	int(5)	
4	id_tahun	int(5)	
5	pagu	decimal(30,0)	
6	nosp2d	text	
7	tglsp3d	date	
8	aktif	enum('Y','N')	FOR KEY

Tabel 20 Tabel Program

No	Nama Atribut	Tipe Data	Ket
1	id_program	int(5)	PRI KEY
2	kode_angka	text	
3	program	text	FOR KEY

Tabel 21 Tabel Realisasi

No	Nama Atribut	Tipe Data	Ket
1	id_realisasi	int(5)	PRI KEY
2	id_anggaran	int(5)	
3	id_tahun	int(5)	
4	realisasi	decimal(30,0)	
5	nomor	varchar(20)	
6	tanggal	date	
7	keterangan	text	FOR KEY

Tabel 22 Tabel Tahun

No	Nama Atribut	Tipe Data	Ket
1	id_tahun	int(2)	PRI KEY
2	Tahun	varchar(4)	
3	Aktif	enum('Y','N')	FOR KEY

Tabel 23 Tabel Users

No	Nama Atribut	Tipe Data	Ket
1	Username	varchar(50)	PRI KEY
2	Password	varchar(50)	
3	id_desa	int(5)	
4	id_kecamatan	int(5)	
5	Level	varchar(20)	
6	Blokir	enum('Y','N')	
7	id_session	varchar(100)	FOR KEY

Tabel 24 Tabel Warna

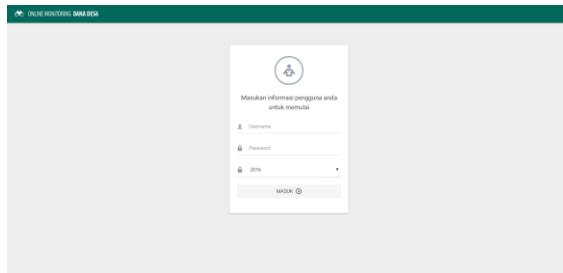
No	Nama Atribut	Tipe Data	Ket
1	id_warna	int(11)	PRI KEY
2	nama_warna	text	
3	Aktif	enum('Y','N')	FOR KEY

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Interface Sistem

#### 1. Halaman Login

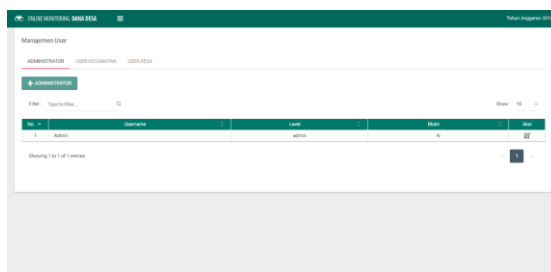
Halaman Login adalah form pengisian untuk mengisi username, password dan memilih tahun agar dapat masuk pada halaman awal



Gambar 4 Halaman Login

#### 2. Halaman Administrator

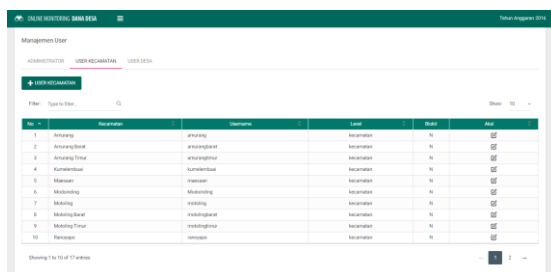
Halaman administrator yang berisi tombol untuk mendaftarkan admin dan daftar admin.



Gambar 5 Halaman Administrator

#### 3. Halaman User Kecamatan

Halaman User Kecamatan berisi tentang daftar user kecamatan, tombol tambah user kecamatan untuk menambah user, dan untuk mengedit user kecamatan pada tombol yang terletak pada tabel dengan nama aksi.

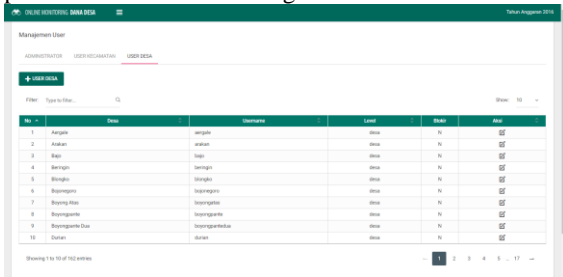


Gambar 6 Halaman User Kecamatan

#### 4. Halaman User Desa

Halaman user desa berisi tentang daftar user desa, tombol tambah user desa untuk menambah user, dan untuk mengedit user desa pada tombol yang terletak

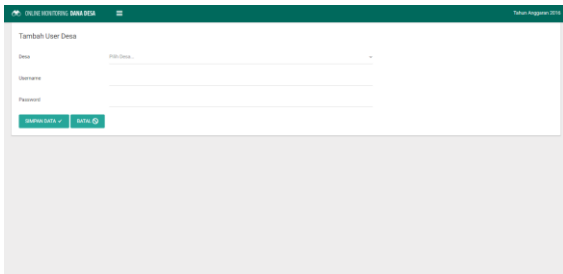
pada tabel dengan nama aksi.



Gambar 7 Halaman User Desa

5. Halaman Tambah User Desa

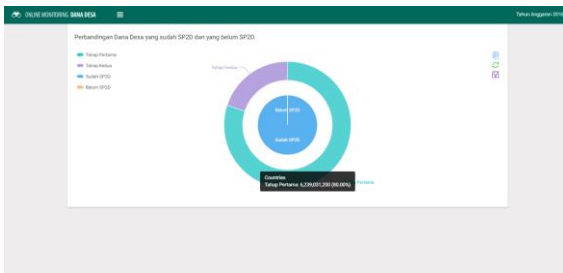
Halaman tambah user desa berisi form untuk mengisi desa, username dan password yang akan ditambah.



Gambar 8 Halaman Tambah User Desa

6. Halaman Grafik

Halaman grafik berisi perbandingan dana desa yang sudah SP2D dan yang belum SP2D.



Gambar 9 Halaman Grafik

7. Halaman Daftar Pagu Per Desa

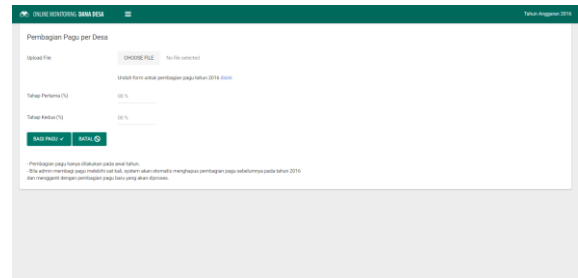
Halaman daftar pagu per desa berisi tentang daftar pagu tahun 2016 dan pembagian pagu tahap satu, tahap dua dan sisa pagu.

No.	Desa	Pagu Tahun 2016	Tahap 1 (SP2D)	Tahap 2 (SP2D)	Sisa	Aksi
1	Angren	Rp 239.340.000	Rp 191.000.000	Rp 47.000.000	Rp 0	EE
2	Andan	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	EE
3	Ban	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	EE
4	Bangka	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	EE
5	Bangka	Rp 245.440.000	Rp 193.700.000	Rp 43.000.000	Rp 0	EE
6	Bongagan	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	EE
7	Bongagan	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	EE
8	Bongagan	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	EE
9	Bongagan Dua	Rp 245.181.000	Rp 194.344.000	Rp 43.000.000	Rp 0	EE
10	Dutan	Rp 245.000.000	Rp 193.344.000	Rp 43.000.000	Rp 0	EE
11	Dutan	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	EE
12	Kuburan	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	EE
13	Kuburan Baru	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	EE

Gambar 10 Halaman Daftar Pagu Per Desa

8. Halaman Bagi Pagu

Halaman bagi pagu terdapat link untuk mendownload format untuk mengisi pagu di tiap desa dan tombol choose file untuk mengupload file pagu. Dan juga ada dua form untuk mengisi pembagian pagu pada tahap pertama dan tahap kedua.



Gambar 11 Halaman Bagi Pagu

9. Halaman Monitoring Alokasi Dana Desa

Halaman monitoring alokasi dana desa menampilkan total pagu, total pagu tahap pertama dan total pagu tahap kedua.

No.	Rekomendasi	Pagu Tahun 2016	Tahap 1 (SP2D)	Tahap 2 (SP2D)
1	Rekomendasi Anggaran	Rp 461.700.000	Rp 394.940.000	Rp 74.240.000
2	Rekomendasi Tunjangan	Rp 239.340.000	Rp 191.000.000	Rp 47.000.000
3	Rekomendasi Anggaran BAKAT	Rp 468.700.000	Rp 397.470.000	Rp 74.800.000
4	Elasan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
5	Harjo	Rp 0	Rp 0	Rp 0
6	Prandia	Rp 241.700.000	Rp 193.000.000	Rp 40.000.000
7	Ranung Sembah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
8	Temp	Rp 0	Rp 0	Rp 0
9	Temp baru	Rp 0	Rp 0	Rp 0
10	Temporan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
11	Wakan	Rp 245.000.000	Rp 194.370.000	Rp 40.000.000
12	Kuburan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
13	Kuburan Baru	Rp 0	Rp 0	Rp 0
14	Loban	Rp 0	Rp 0	Rp 0

Gambar 12 Halaman Monitoring Alokasi Dana Desa

10. Halaman Rekapitulasi Presentase Penyerapan

Halaman rekapitulasi presentase penyerapan menampilkan total pagu, total realisasi dan presentase realisasi.

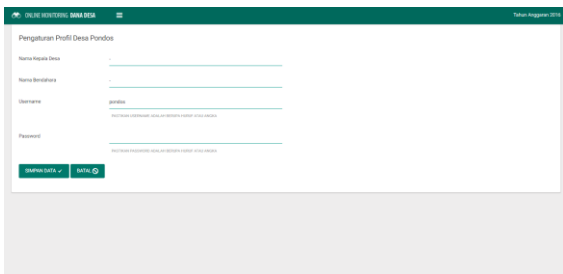
No.	Rekomendasi	Pagu Tahun 2016	Realisasi	Persentase
1	Rekomendasi Anggaran	Rp 461.700.000	Rp 394.940.000	85,5
2	Rekomendasi Tunjangan	Rp 239.340.000	Rp 191.000.000	79,8
3	Rekomendasi Anggaran BAKAT	Rp 468.700.000	Rp 397.470.000	84,8
4	Elasan	Rp 0	Rp 0	0
5	Harjo	Rp 0	Rp 0	0
6	Prandia	Rp 241.700.000	Rp 193.000.000	79,8
7	Ranung Sembah	Rp 0	Rp 0	0
8	Temp	Rp 0	Rp 0	0
9	Temp baru	Rp 0	Rp 0	0
10	Temporan	Rp 0	Rp 0	0
11	Wakan	Rp 245.000.000	Rp 194.370.000	79,3
12	Kuburan	Rp 0	Rp 0	0
13	Kuburan Baru	Rp 0	Rp 0	0
14	Loban	Rp 0	Rp 0	0

Gambar 13 Halaman Rekapitulasi Presentase Penyerapan

11. Halaman Profil User Desa

Halaman profil user desa merupakan halaman untuk mengisi nama kepala desa, bendahara dan mengedit username dan password desa.

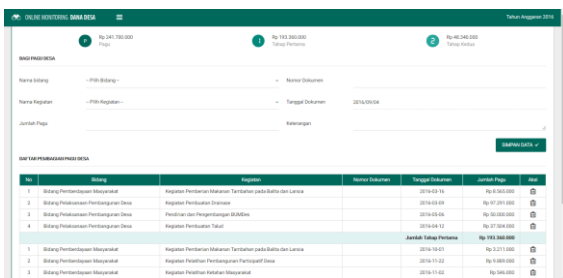




Gambar 14 Halaman Profil User Desa

12. Halaman Pembagian Pagu Kegiatan

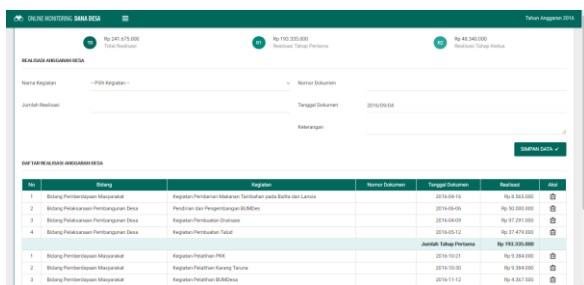
Halaman pembagian pagu kegiatan merupakan halaman user desa untuk mengisi pagu nama bidang, nama kegiatan, jumlah pagu, nomor dokumen, tanggal dokumen dan keterangan.



Gambar 15 Halaman Pembagian Pagu Kegiatan

13. Halaman Mengisi Realisasi Anggaran

Halaman realisasi anggaran desa merupakan halaman user desa untuk mengisi nama kegiatan, jumlah realisasi, nomor dokumen, tanggal dokumen dan keterangan.



Gambar 16 Halaman Mengisi Realisasi Anggaran

DAFTAR REFERENSI

- [1] Indah Fauziah. 2011. Prototype Aplikasi Info Rekening Listrik PLN (IRT) Berbasis Mobile. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- [2] Kurniawan. 2005. Pengertian Media Online. Jakarta
- [3] Livia Muallifah. 2016. Monitoring Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo. UMY Indonesia.
- [4] Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- [5] Minselkab. 2013. Profil Kabupaten Minahasa Selatan. Manado: Seputar Sulut

SEKILAS TENTANG PENULIS



Saya bernama Kezia Elsa Eunike Ondang dan merupakan anak ketiga dalam keluarga, lahir di Manado pada tanggal 02 November 1994. Saya berasal dari minahasa selatan.

Saya mulai menempuh pendidikan di TK Putra 3 Paniki Bawah (1998-1999). Kemudian melanjutkan sekolah dasar SD Inpres 1 Paniki Bawah (1999 - 2003) dan pindah di SD GMIM Pondos (2003-2006). Kemudian melanjutkan studi tingkat pertama di SMP N 3 Tenga (2006 - 2009) dan selanjutnya saya menempuh pendidikan tingkat atas di SMA N 1 Manado (2009- 2012).

Setelah itu, di tahun 2012 saya melanjutkan pendidikan ke salah satu perguruan tinggi yang berada di Manado yaitu Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan mengambil Program Studi S-1 Teknik Informatika di Jurusan Elektro Fakultas Teknik.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem informasi Online Monitoring Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan berbasis web ini, dapat memudahkan SKPD dan Kecamatan dalam memonitoring penggunaan dana desa

B. Saran

Sistem Online Monitoring Dana Desa dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan operating system android serta ditambahkan fitur-fitur dana APBD.